

PENGARUH VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL TERHADAP ALOKASI DAU DI INDONESIA

Oleh :
Azwardi

ABSTRACT

The aim of this research is to know the influence of fiscal needs to allocation Dana Alokasi Umum (DAU). Fiscal needs are population, area of province, density, construction index, the poverty allo and government index.

Based on the regression that use scunder data we know that population and government expenditure are positif, but other variable is negative.

Keywords: fiscal needs, dana alokasi umum (DAU)

PENDAHULUAN

Selama ini di Indonesia terdapat hubungan yang asimetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang keuangan publik. Pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, dan ketergantungan tersebut meliputi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dengan pola ketergantungan seperti ini menjadi jelas bahwa sebagian terbesar kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah pusat, bahkan banyak proyek yang tidak sesuai dengan potensi dan tuntutan daerah, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan.

Otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah No. 25. Tahun 1999. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk untuk mengatasi ketimpangan yang selama ini terjadi di Indonesia (Mahi, 2000; 1 ; Sjafrizal, 2000; 3-10).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dikemukakan bahwa, dana perimbangan terdiri dari bagian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah pusat mendistribusikan DAU berdasarkan formula pemerataan yang mengukur kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dari setiap daerah. Kapasitas fiskal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah

untuk meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sedangkan kebutuhan fiskal adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik minimum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah (Ma, 1997; 3-49).

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Bagaimana pengaruh variabel kebutuhan fiskal yang terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, jumlah penduduk miskin dan pengeluaran rata-rata terhadap nilai DAU yang diterima oleh pemerintah Propinsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu pilar desentralisasi fiskal adalah transfer yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal vertikal dan horizontal serta sebagai akibat terjadinya “spill-over effects” (Ma, 1997; 1-2 ; Oates, 1999; 1126).

Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu transfer bersyarat (conditional grants) dan transfer tidak bersyarat atau “unconditional grants” (Oates, 1999; 1126-1130).

Transfer tanpa syarat biasanya ditentukan berdasarkan formula pemerataan yang mengukur kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dari setiap daerah. Kapasitas fiskal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sedangkan kebutuhan fiskal adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik minimum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Transfer yang diberikan hubungannya harus searah dengan kebutuhan fiskal pemerintah daerah dan berlawanan arah dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah (Ma, 1997; 3-49).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat “hypothesis testing”, sedangkan objek penelitian mengenai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Propinsi. Ruang lingkup penelitian adalah pengaruh variabel kebutuhan fiskal yang terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, jumlah penduduk miskin terhadap nilai DAU yang diterima oleh pemerintah Propinsi pada tahun 2002.

Data yang diolah dan dianalisis berupa data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (DJPKPD) Departemen Keuangan.

Data sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui persamaan regresi sederhana.

$$DAU_i = b_0 + b_1 Pdk + b_2 Kpdt + b_3 Pdk Mskn + b_4 Ihbgn + b_5 Pglrn$$

Keterangan :

- DAU = jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima suatu propinsi
- Pdk = jumlah penduduk berdasarkan propinsi
- KPdtm = kepadatan penduduk berdasarkan propinsi
- Pdk Mskn = jumlah penduduk miskin berdasarkan propinsi
- Ihbng = indeks harga bangunan berdasarkan propinsi
- Pglrn = pengeluaran pemerintah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998/1999 transfer yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 17.862,91 trilyun, meningkat menjadi Rp. 24,409 trilyun pada tahun 1999/2000 dan Rp. 25,496 trilyun pada tahun 2000. Sedangkan dalam era desentralisasi fiskal, meningkat menjadi Rp. 83,626 Trilyun untuk tahun 2001 dan menjadi Rp. 92,114 trilyun untuk tahun 2002.

Tabel 1. Transfer Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Tahun 1998/1999 sampai dengan Tahun 2002

No	Tahun	Jumlah (Trilyun Rp.)
1	1998/1999	17.862
2	1999/2000	24,409
3	2000	25,496
4	2001	83,626
5	2002	92,114

Sumber : BPS dan DJPKPD

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa dana perimbangan terdiri dari bagi hasil, DAU dan DAK. Pada tahun 2001 nilai DAU yang disalurkan sebesar Rp. 60.929 trilyun atau merupakan sekitar 72 % dari nilai dana perimbangan secara keseluruhan, yaitu 83,626 trilyun. Sementara itu pada tahun 2002 nilai DAU yang didistribusikan sebesar Rp. 68.471.575,41 atau merupakan 73 % dari dana perimbangan sebesar Rp. 92,114 trilyun.

Sebagian besar nilai DAU diserap oleh pemerintah Kabupaten-kota (%), karena wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten-kota lebih besar bila dibandingkan dengan pemerintah Propinsi.

Pada tahun 2002 jumlah DAU terbesar diterima oleh propinsi Jatim, yaitu Rp. 9,346 trilyun, diikuti oleh Jateng dan Jabar, masing-masing sebesar Rp. 8,593 trilyun dan 6,912 trilyun.

Tabel 2. Distribusi DAU Berdasarkan Pemerintah Daerah Tahun 2001-2002 (Juta Rp.)

No	DAU	2001	2002
1	Propinsi	6.521.945,00	7.557.598,68
2	Kabupaten	46.213.642,50	50.425.138,43
3	Kota	8.193.799,17	10.488.838,30
4	Kabupaten+Kota	54.407.441,66	60.913.976,75
J U M L A H		60.929.387,07	68.471.575,41

Sumber : DJPKPD

Pengaruh Variabel Kebutuhan Fiskal Terhadap DAU yang Diterima

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$DAU = 1.656,763 + 0,187 Pdk - 0,763 Kpdpdk - 0,107 Pdkmskn - 9,464 Ihbgn + 5,609 Bpgwi$$

Berdasarkan uji F diketahui, bahwa variabel kebutuhan fiskal yang terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, penduduk miskin, indeks harga bangunan dan belanja pegawai secara bersama-sama mempengaruhi nilai DAU propinsi. Sedangkan berdasarkan uji t, ternyata hanya variabel penduduk miskin yang tidak signifikan, namun secara teoritis koefisien indeks harga bangunan dan kepadatan penduduk mempunyai tanda yang berlawanan dengan teori. Nilai R^2 sebesar 0,975, berarti variabel-variabel kebutuhan fiskal dalam penelitian sebesar 97,5 % mempengaruhi alokasi DAU. Sedangkan sebesar 22,5 % dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu nilai "eigenvalue" yang cenderung tidak mendekati nol menunjukkan di antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

Namun demikian model ini secara riil belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, karena belum memasukkan unsur bobot kebutuhan fisal serta variabel kapasitas fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uji F variabel kebutuhan fiskal yang terdiri dari jumlah penduduk, penduduk miskin, kepadatan, indeks harga bangunan dan belanja pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap DAU yang diterima propinsi.

Berdasarkan uji t, hanya variabel penduduk miskin yang tidak signifikan, namun demikian secara teoritis koefisien indeks harga bangunan dan belanja pegawai mempunyai tanda yang berlawanan dengan teori.

Saran-Saran

1. Dalam penelitian lanjutan, sebaiknya memasukkan unsur bobot kebutuhan fiskal.
2. Di samping itu dalam penelitian berikutnya perlu untuk menambahkan unsur kapasitas fiskal, sehingga persamaan yang digunakan berbentuk persamaan simultan
3. Formula DAU yang digunakan pada dasarnya untuk jangka pendek (sekitar lima tahun), sehingga diperlukan untuk menambahkan variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal yang secara teoritis lebih representatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Ehtisham and Hofman, Bert. Indonesia: Decentralization-Opportunities and Risks. IMF and World Bank Resident Mission, 2000.
- Bahl, Roy. Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries : Principles and Practise. International Studies Program School of Policy Studies Georgia State University. Atlanta, Georgia, 2001.
- Bird, Richard M and Smart, Michael, Intergovernmental Fiscal Transfers: Some Lessons From International Experience. International Tax Program Rotman School of Management, University of Toronto, 2001.
- Boex, Jameson. An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relations. International Studies Program School of Policy Studies Georgia State University. Atlanta, Georgia. Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, 1994. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Ma, Jun. Intergovernmental Fiscal Transfer In Nine Countries; Lessons From Developing Countries. Policy Research Working Paper 1822. The World Bank Economic Institute Macroeconomic Management and Policy Division, 1997.
- Mahi, Raksaka. Kebijakan Bantuan Pusat ke Daerah: Implikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan Antar Daerah. Disampaikan pada Konggres ISEI XIV di Maksar, 21-23 April 2000.
- Oates, Wallace E., Fiscal Federalism. Princeon University, USA, 1972.
- Shah, Anwar. A Fiscal Need Approach to Equalization Transfer in a Decentralization. Policy Research Working Paper 1289. The World Bank Policy Research Departement Public Economics Division, 1994.
- Stiglitz, Joseph E. Economic of The Public Sector. Third Edition, W.W. Norton Company, New York, USA, 2000.
- Syafrizal. Ketimpangan Ekonomi Daerah: “Tendensi Penyebab dan Kebijakan Penanggulangan”. Disampaikan pada Konggres ISEI XIV di Makasar, 21-23 April 2000.